



SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) KINERJA DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016

Denpasar, Selasa (27/12/2016) – Sesuai dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

Sementara itu, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan di luar Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja. Termasuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dan dapat bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati.

Pada Semester II Tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah melaksanakan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada tujuh entitas Pemerintah Daerah, dengan rincian pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional dengan sampel Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan sampel ULP Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem;
3. Pemeriksaan atas Kinerja Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2014 s.d 2016 (Semester I) dengan sampel Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Bangli;
4. Pemeriksaan atas Fasos dan Fasum TA 2014 s.d 2016 pada Pemerintah Kabupaten Badung;

5. Pemeriksaan atas Belanja Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan 2016(s.d September) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem;
6. Pemeriksaan atas Operasional PD Pasar Kota Denpasar; dan
7. Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d Oktober) dengan sampel Pemerintah Provinsi Bali.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari ini (Selasa, 27/12) BPK Perwakilan Provinsi Bali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah yang menjadi entitas pemeriksaan-pemeriksaan dimaksud. LHP diserahkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho, kepada para Ketua DPRD dan Kepala Daerah yang terkait, di Auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Sesuai dengan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI, selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima. Sementara itu, DPRD sebagai wakil rakyat dapat memanfaatkan Laporan Hasil Pemeriksaan ini, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPRD, dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

BPK menghimbau kepada para Kepala Daerah beserta jajarannya untuk memperhatikan masalah-masalah yang berulang dan rekomendasi yang belum tuntas untuk ditindaklanjuti. BPK akan tetap mendorong Pemerintah Daerah untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah secara sistemik dan konsisten.

Humas BPK Perwakilan Provinsi Bali

Ida Ayu Putu Risnawati (Kepala Subbagian Humas dan TU)

Telp. +62 361 229193 • Fax. +62 361 229184, 256205

Web. <http://denpasar.bpk.go.id>

Email. ida.risnawati@bpk.go.id